

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Keria tentang Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan perubahan atas struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 13. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsionai Auditor dan Angka Kreditnya;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 25 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 13
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 210) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 25 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 25);
- b. Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 02); diubah sebagai berikut :
- 1. Ketentuan Lampiran I pada Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur:
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. Lampiran I pada Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV melaksanakan tugas sesuai dengan wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV diatur dalam Peraturan Bupati.
- 3. Lampiran I Pasal 7, 8, 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 12 Mei 2015 BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 12 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

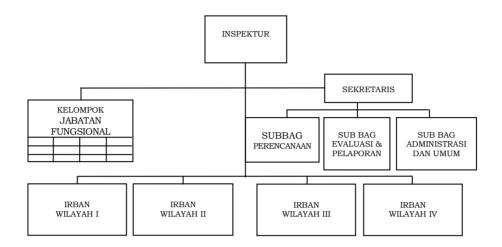
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 5 TAHUN 2015 TANGGAL: 12 MEI 2015

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara effektif dan effisien sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membentuk beberapa Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013.

Inspektorat Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Sejalan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi guna meningkatkan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan secara internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu adanya perubahan pada susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 281